

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

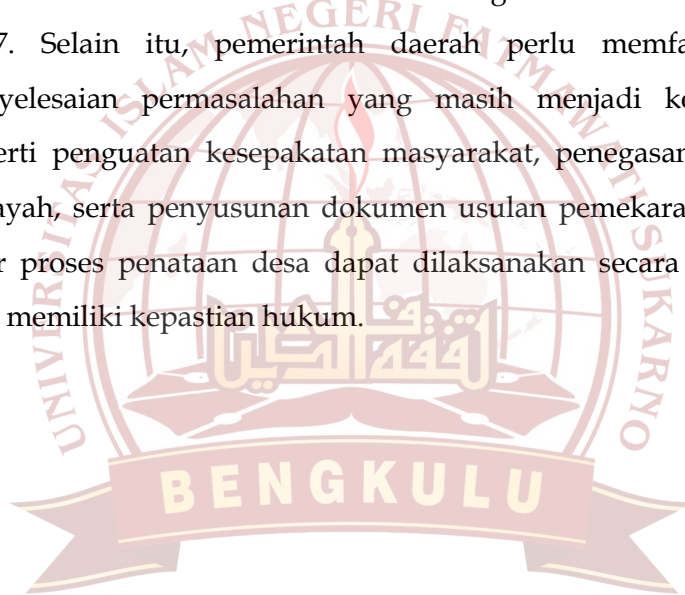
1. Problematika pemekaran Desa Padang Peri lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan belum tercapainya kesepakatan masyarakat dibandingkan aspek regulasi. Meskipun tahapan awal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 telah dilaksanakan, proses pemekaran belum dapat dilanjutkan karena belum adanya persetujuan masyarakat secara menyeluruh.
2. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, pelaksanaan pemekaran Desa Padang Peri telah mengarah pada kemaslahatan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan persatuan akibat masih adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Padang Peri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar terus mengoptimalkan sosialisasi dan musyawarah kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pemekaran desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pendekatan yang partisipatif dan persuasif perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sehingga tercapai kesepakatan bersama serta meminimalisasi perbedaan

persepsi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam proses pemekaran desa.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Pemerintah Kecamatan Semidang Alas Maras, agar memberikan pendampingan secara intensif kepada Pemerintah Desa Padang Peri dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Selain itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang masih menjadi kendala, seperti penguatan kesepakatan masyarakat, penegasan batas wilayah, serta penyusunan dokumen usulan pemekaran desa agar proses penataan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan memiliki kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

An-Nisa ayat 58

QS. Asy-Syura ayat 38

B. Buku

A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2018)

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2019)

Bagir Manan, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015)

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2017)

Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016)

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019)

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' ayat 58

Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Governance Indonesia, (Jakarta: KNKG, 2016)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2018)

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014)

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2019)

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 2017)

Sawir, Mohammad, Dinamika Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia, (Makassar: CV. Karsa Cendekia, 2025)

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance, (Bandung: Mandar Maju, 2019)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Anisa, Qonita Aulia, Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani

Berjaya (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan), skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2026

Dela Puspita, Mekanisme Pemekaran Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024

Fuadi, Fajriatul, Pengawasan kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan prinsip hisbah dalam Islam, MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Volume 15 Nomor 1 (2025)

Iswantini, Tri, Liky Faizal dan Arif Fikri, Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies, Volume 4 Nomor 2 (2025)

Lintang Prabowo dan M. Tenku Rafli, Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 2 Nomor 2 (2020)

Monalisa, Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Percepatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Studi Kasus Desa Walay Kecamatan Abuki, skripsi, IAIN Kendari, 2025

Nurnovianah, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus), skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020

Simandjuntak, Reynold, Sistem desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia perspektif yuridis konstitusional, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 7 Nomor 1 (2015)

Versitas Andal, Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau, skripsi, Departemen Administrasi

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas Padang 2025

Zespy Ria Refvita. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara), Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2023

D. Internet

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

E. Informan Penelitian

Informasi warga desa Padang Seri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa